Journal of Social Science and Multidisciplinary Analysis
Vol. 2 No. 2, April 2025
https://jossama.com

ANALISIS INFRASTRUKTUR JALAN DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN WAY KANAN

Lyrra[1], Erlin Kurniati[2]

[1] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
[2] Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis analisis infrastruktur jalan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan, Lampung. Pembangunan ekonomi merupakan indikator penting dalam menilai kemajuan suatu daerah, di mana infrastruktur fisik dan kualitas sumber daya manusia menjadi komponen utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa infrastruktur jalan yang memadai meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa serta aksesibilitas masyarakat terhadap pasar dan layanan publik, yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi. Di sisi lain, IPM yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup layak juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sinergi antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan IPM berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah yang berfokus pada peningkatan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia guna memaksimalkan dampak ekonomi di Kabupaten Way Kanan.

Kata Kunci: Infrastrukur, Infrastruktur jalan, Indeks Pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi

CORRESPONDING:
Name:
Lyrra
E-mail:
lirablt@mail.com

ARTICLE HISTORY:
Submitted date:
15-04-2025
Published Online:
27-04-2025

E-ISSN:
3046-7225

PUBLISHER:
Noble Cendekia Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Salah satu tolok ukur utama dalam menilai perkembangan sebuah negara adalah laju pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan positif dengan peluang peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk membuat kebijakan pembangunan yang efektif, sangat penting untuk memahami komponen-komponen yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Infrastruktur fisik dan kualitas sumber daya manusia merupakan dua komponen yang secara luas diakui mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kelancaran arus barang, jasa, dan manusia sangat dipengaruhi oleh infrastruktur, khususnya jalan. Mobilitas ekonomi bergantung pada ketersediaan dan kualitas jalan yang baik, terutama di daerah yang memiliki potensi pertaniandan perkebunan seperti Kabupaten Way Kanan (Todaro,2020).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan mutu sumber daya manusia, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengambil bagian dalam pembangunan dan memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Barro (1996). Lebih jauh lagi UNDP (1990) menjelaskan bahwa pembangunan manusia diartikan sebagai suatu proses dalam memperluas berbagai pilihan yang tersedia bagi masyarakat. Tiga pilihan utama yang dinilai paling penting meliputi umur panjang dan kesehatan (kelangsungan hidup), pendidikan serta penguasaan pengetahuan (aspek kognitif), dan akses terhadap sumber daya yang mampu menjamin standar hidup yang layak.

Kemampuan orang untuk memanfaatan serta mengatur sumber daya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh tingkat pembangunan manusia yang optimal. Dengan demikian, mutu sumber daya manusia bukan hanya factor pendukung, melainkan penentu utama dalam proses pembangunan. Pengembangan kelembagaan dan teknologi merupakan fasilitas utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Brata dalam NyomanLilya:2014).

Kabupaten Way Kanan, yang terletak di bagian utara Provinsi Lampung, memiliki banyak potensi ekonomi. Dengan luas lebih dari 3.900 km², Way Kanan memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini didukung oleh sektor unggulan seperti pertanian, perkebunan, dan, peternakan. Komoditas utama seperti karet, kelapa sawit, dan singkong tersebar luas di banyak kecamatan dan berkontribusi pada

perekonomian lokal. Namun, karena masih adanya kendala dalam Pembangunan infrastruktur dasar, terutama infrastruktur jalan, potensi tersebut belum sepenuhnya dioptimalkan. Jalan raya di beberapa distrik seperti Negeri Besar, Banjit, dan Bahuga masih rusak atau belum terhubung dengan baik, yang menyebabkan biaya distribusi tinggi, keterbatasan akses ke pasar, dan tertundanya investasi lokal.

Sebagai salah satu wilayah di Provinsi Lampung, Kabupaten Way Kanan menghadapi tantangan khusus dalam hal pertumbuhan ekonomi. Keterbatasan infrastruktur jalan menjadi hambatan utama, meskipun sektor unggulan seperti perkebunan dan peternakan memiliki potensi besar. Karena kondisi jalan yang tidak ideal di banyak wilayah, distribusi hasil produksi, akses ke pasar, dan mobilitas masyarakat masih terhambat. Masalah ini tidak hanya mempengaruhi distribusi barang dan jasa, tetapi juga berdampak luas pada daya tarik investasi.

Paulus (2019) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa karena keterbatasan infrastruktur, bisnis yang sudah ada tidak akan tertarik untuk mengembangkan bisnis mereka lagi. Kurangnya ketertarikan investor baru untuk berinvestasi dapat berimbas pada penurunan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), yang selanjutnya berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi. Kondisi infrastruktur jalan yang rusak menghambat arus kegiatan ekonomi di suatu wilayah dan mengurangi kemudahan akses masyarakat terhadap aktivitas perekonomian. Selain itu, jalan yang tidak layak memperburuk mobilitas antarwilayah serta menghambat distribusi barang. Minimnya infrastruktur juga membuat banyak masyarakat terisolasi di daerah terpencil, dengan tingkat kemiskinan yang sangat tinggi, sehingga sulit untuk mengatasi berbagai masalah yang mengganggu kehidupan masyarakat, seperti kemiskinan, penyebaran penyakit menular, kekurangan gizi, tingkat buta huruf yang tinggi, serta keterbelakangan. Menyediakan infrastruktur fundamental adalah solusi utama yang dapat mengatasi berbagai permasalahan tersebut. Menurut

Mankiw dalam Lulus (2015), pertumbuhan ekonomi dan investasi suatu negara atau daerah bergantung pada ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan perbaikannya oleh pemerintah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mendorong perkrmbangan ekonomi yang inklusif pada daerah seperti

Kabupaten Way Kanan. Kombinasi keduanya tidak hanya memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Adapun penelitian terdahulu yang ditulis ole Dwi Rayana Siregar dan Ahmad Albar Tanjung dengan judul pengaruh infrastuktur dan indeks Pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Langkat 2010-2019 dengan menggunakan metode kuantitatif hasil ini menunjukan bahwa infrastruktur jalan yang baik tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten Langkat sementara variabel IPM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Lngkat, selanjutnya penelitian yang di tulis oleh Diva Septia Yovani dan Muhammad Irfan dengan judul analisis pengaruh infrastruktur terhadap pertumbhan ekonomi di Sumatera Selatan menggunakan metode kualitatif dan mendapatan hasil bahwa pemerintah perlu meningkatkan pembangnan infrastruktur dengan memepertimbangkan prioritas dan aktivitas ekonomi suau wilayah agar mengurangi ketimpangan dan mencapai pemerataan pertumbuhan ekonomi.

Maka dengan dengan adanya penelitian terdahulu penulis mengambil judul analisis infrastruktur jalan dan indeks Pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan. Dengan berbagai masalah yaitu, bagaimana kondisi dn perkembngan infrastrukurjalan di Kabupaten Way Kanan dan bagaimana dampak indeks pembangunan manusia yang mencakup aspe pendidikan,kesehatan, dan standar hidup layak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan. Adapun tujuan dari penelitin ini yaitu, untuk menganalisis kondisi serta perkembangan infrastruktur jalan terhadap pertumbuan ekonomi di Kabupaten Way Kanan dan untuk mengkaji pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan

2. KAJIAN TEORI

Kajian teori berfungsi sebagai dasar konseptual untuk memahami berbagai fenomena yang menjadi fokus penelitian. Pada penelitian ini, kajian teori membahas konsep-konsep utama seperti infrastruktur, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan pertumbuhan ekonomi. Berbagai konsep teoritis yang diuraikan nantinya akan menjadi pijakan dalam menganalisis keterkaitan antar variabel dalam konteks pembangunan daerah di Kabupaten Way Kanan.

2.1 Infrastruktur

Infrastruktur merupakan komponen fisik yang dirancang dan disediakan oleh institusi pemerintah guna menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan, khususnya dalam penyediaan layanan dasar seperti air bersih, energi listrik, sistem pengelolaan limbah, transportasi, serta pelayanan publik lainnya yang mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi dan sosial (Paulus, 2019).

Menurut Vaughn dan Pollard dalam Lulus (2015), infrastruktur secara umum mencakup berbagai sarana fisik seperti jalan, jembatan, sistem air dan pembuangan, bandara, pelabuhan, gedung-gedung publik, serta fasilitas penting lainnya seperti sekolah, layanan kesehatan, lembaga pemasyarakatan, tempat rekreasi, pembangkit listrik, layanan keamanan, pemadam kebakaran, tempat pembuangan sampah, dan sistem telekomunikasi.

Sementara itu, Meidiana (2019) menyatakan bahwa infrastruktur tidak hanya terbatas pada aset fisik, tetapi juga mencakup kerangka kerja organisasi, pengetahuan, serta teknologi yang esensial bagi tatanan sosial dan kemajuan ekonomi suatu masyarakat. Infrastruktur dalam pengertian ini mencakup sistem hukum, pendidikan dan kesehatan publik, distribusi dan pengelolaan air, pengumpulan dan pengolahan sampah serta limbah, layanan keselamatan masyarakat seperti pemadam kebakaran dan keamanan, sistem komunikasi, transportasi, serta berbagai fasilitas umum lainnya.

2.2 Infrastruktur Jalan

Menurut aturan yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2022, ayat 1 Pasal 16 menyatakan bahwa (1) memberi wewenang kepada pemerintah daerah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa serta pembinaan jalan desa menjadi bagian dari kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, Pasal 16A menyebutkan bahwa pada ayat (1), pemerintah kabupaten diberi kewenangan dalam penyelenggaraan jalan, termasuk jalan desa, sementara ayat (2) memperluas kewenangan tersebut mencakup penyelenggaraan infrastruktur jalan secara umum. Infrastruktur jalan yang memadai akan memberikan manfaat besar bagi sektor industri dan bisnis, khususnya dalam mendukung mobilitas antar lokasi.

Akibatnya, hal ini menghasilkan peningkatan aktivitas perekonomian di wilayah tersebut, yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan desa setempat bertanggung jawab sepenuhnya untuk membangun jalan desa yang baik, yang

berperan dalam meningkatkan aktivitas sosial ekonomi serta mendorong kemajuan masyarakat di wilayah tersebut. Namun, apabila desa tidak mampu melaksanakannya, pembangunan jalan desa dapat dialihkan kepada pemerintah daerah kota atau kabupaten. (Putri Aren Sinta, 2022).

Penyebab kerusakan jalan merupakan isu krusial dalam pembangunan nasional. Saat ini, pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota menghadapi berbagai tantangan, baik dari sisi teknis maupun kelembagaan. Menurut Bintoro (1997:16), terdapat dua kategori utama yang menjadi penyebab kerusakan jalan, yaitu:

1. Faktor Teknis
    1) Jalan berlubang disebabkan kendaraan mengangkut beban yang melebihi kapasitas yang dapat ditahan oleh jalan tersebut.
    2) Sistem drainase yang buruk membuat perkerasan jalan menjadi lentur dan lebih rentan mengalami retak.
    3) Kualitas konstruksi yang rendah, seperti penggunaan bahan bangunan yang tidak memenuhi standar atau tidak sesuai dengan kondisi kontur tanah, juga menjadi faktor kerusakan.
2. Faktor Kelembagaan
    1) Perencanaan, Tahap awal perbaikan atau pemeliharaan jalan yang jika dilakukan secara kurang matang, akan membuat jalan kembali rusak dalam waktu singkat.
    2) Pemrograman, Proses penyusunan kegiatan pemeliharaan jalan harus mempertimbangkan kondisi eksisting agar upaya perbaikan benar-benar mendukung tujuan pembangunan.
    3) Penganggaran, Ketersediaan dana yang tidak memadai menyebabkan pemeliharaan jalan dilakukan dengan cara yang kurang optimal dan tidak sesuai kebutuhan medan.
    4) Kurangnya koordinasi lintas sector, Lemahnya kerja sama antar lembaga terkait memperburuk efektivitas upaya perbaikan dan pemeliharaan jalan.

Di dalam jurnal patresia stella I. Dumatubun (2024), menyatakan bahwa terdapat dampak positif dan negatif sebagai berikut:

1. Dampak Positif

1) Karena pembangunan dan peningkatan jalan telah menyediakan alat transportasi yang membantu masyarakat untuk melakukan usaha yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
2) Dengan adanya pembangunan dan peningkatan jalan, mobilitas masyarakat antar daerah menjadi lebih cepat karena ases trsnaportasi yang semakin lancer.

2. Dampak Negatif

1) Trotoar yang seharusnya digunakan untuk pejalan kaki, kini digunakan untuk bisnis.
2) Jalan tidak selalu diperbaiki dari simpang busiri ujungnya.
3) Ruas jalan ini menjadi tempat tongkrongan dan balapan pembohong oleh anak motor dan geng pembohong.
4) Ada kecelakaan karena rambu lalu lintas.
5) Ada seringnya kejahatan seperti begal dan rencana pembunuhan.

2.3 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Basri (2009) menyatakan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menentukan apakah suatu negara tergolong maju, berkembang, atau terbelakang. Dengan demikian, IPM berfungsi sebagai indikator untuk menilai sejauh mana program dan kebijakan pemerintah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Negara-negara kemudian diklasifikasikan menjadi negara kaya, berpendapatan tinggi, berpendapatan menengah atas, berpendapatan menengah bawah, dan negara miskin atau berpenghasilan rendah. Pembangunan manusia jelas berbeda dari pembangunan fisik, yang lebih berfokus pada infrastruktur seperti bangunan, fasilitas umum, dan sarana prasarana lainnya. Namun, pembangunan manusia memberikan efek multiplier jangka panjang yang berbeda dan lebih berdampak dibandingkan pembangunan fisik. Dengan fokus pada pembangunan manusia yang optimal, kemajuan suatu negara akan lebih signifikan.

Sumarsono (2001) menyatakan bahwa, telah terjadi perubahan dalam pandangan terhadap paradigma pembangunan. Pada tahun 1960-an, paradigma yang digunakan berfokus pada produksi, kemudian bergeser di tahun 1970-an menjadi paradigma pembangunan yang menekankan pada distribusi hasil pembangunan. Pada dekade 1980-an, muncul pendekatan pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar, yang kemudian kembali ditekankan pada tahun 1990-an. Cara untuk menghitung Indeks

Pembangunan Manusia (IPM), UNDP menggunakan beberapa indikator utama, yaitu harapan hidup (sebagai representasi kesehatan), tingkat pendidikan, dan standar hidup berdasarkan pendapatan. Indikator ini kemudian dijadikan dasar untuk mengklasifikasikan negara-negara di dunia ke dalam kategori negara terbelakang, berkembang, atau maju.

2.4 Pertumbuhan Ekonomi

Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) pada suatu negara dalam jangka panjang disebut pertumbuhan ekonomi, tanpa mempertimbangkan apakah laju pertumbuhannya akan melebili besar atau lebih kecil dari pertumbuhan penduduk. Namun, dalam konteks pembangunan ekonomi, kenaikan PDB harus lebih besar dari pertumbuhan penduduk agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa output suatu negara meningkat, yang menunjukkan kemajuan dalam berbagai bidang ekonomi. (Todaro ,2020).

Dalam pandangan teori ekonomi Neoklasik, Abramovits dan Solow mengemukakan pendapat bahwa penambahan investasi dan sumber daya manusia bukanlah komponen utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, peningkatan teknologi serta peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja menjadi unsur utama yang sangat menyentuh. Solow (1970) dan Swan (1956) mengembangkan teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Dalam model Solow-Swan, pertumbuhan penduduk, akumulasi modal, kemajuan teknologi, dan tingkat output saling terkait dan mempengaruhi satu sama lain. Selain itu, model ini menggunakan fungsi produksi yang memungkinkan terjadinya substitusi antara kapital dan tenaga kerja.

Berdasarkan teori Solow-Swan, dalam banyak situasi, mekanisme pasar mampu mencapai keseimbangan secara mandiri tanpa memerlukan intervensi atau campur tangan berlebihan dari pemerintah. Kebijaksanaan fiskal dan moneter adalah satu-satunya batas intervensi pemerintah. Hal inilah yang melahirkan istilah “teori neo-klasik” terhadap teori mereka dan pandangan para ahli lain yang sejalan. Tiga faktor utama pertumbuhan ekonomi meliputi akumulasi modal, peningkatan ketersediaan tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Dalam teori neoklasik, yang merupakan kelanjutan dari teori klasik, diyakini bahwa perekonomian secara alami bergerak menuju kondisi pasar sempurna. Kemajuan teknologi dipahami sebagai peningkatan keterampilan atau inovasi teknologi yang mendorong

produktivitas per kapita. Perekonomian akan mencapai pertumbuhan optimal ketika kondisi pasar sempurna tercapai.

Menurut Todaro dan Smith (2006) yang mengutip pendapat Kuznets, Kuznets mengemukakan analisis mengenai enam ciri utama pertumbuhan ekonomi modern, yang didasarkan pada produk nasional, komponennya, serta faktor-faktor seperti populasi, tenaga kerja, dan aspek lainnya. Enam karakteristik tersebut meliputi:

1. Pertumbuhan pesat dalam jumlah penduduk dan produk per kapita;
2. Peningkatan produktivitas masyarakat;
3. Lonjakan pertumbuhan yang sangat signifikan;
4. Tingginya tingkat urbanisasi;
5. Ekspansi ke negara-negara maju; dan
6. Arus perdagangan, investasi, dan mobilitas manusia yang melintasi berbagai negara di dunia

3. METODE PENELITIAN

Jenis Metode Penelitian Berdasarkan Sifatnya

Penelitian ini bersifat deskriptif, yakni bertujuan untuk menggambarkan pemecahan masalah yang tengah terjadi berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan. Moleong (2017:6) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Dalam studi ini, peneliti akan mendeskripsikan kondisi infrastruktur jalan dan indeks pembangunan manusia serta hubungannya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan.

Sumber Data

Sumber data merupakan segala hal yang dapat memberikan informasi yang relevan dengan penelitian. Dalam studi ini, data yang digunakan berasal dari data sekunder. Menurut Sugiyono (2018:456), data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari responden, melainkan melalui pihak ketiga atau dokumen. Sumber data sekunder dalam

penelitian ini meliputi buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik mengenai infrastruktur jalan dan indeks pembangunan manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Way Kanan memiliki posisi yang strategis di wilayah Provinsi Lampung dengan karakteristik geografis yang cukup kompleks, terdiri dari kawasan pedesaan dan beberapa jalur penghubung antar daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan infrastruktur jalan di kabupaten ini menunjukkan kemajuan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Peningkatan kualitas jalan utama dan jalan penghubung antar kecamatan memberikan dampak yang signifikan terhadap mobilitas masyarakat dan distribusi barang dan jasa di wilayah ini.

Infrastruktur jalan yang memadai mempercepat waktu tempuh antar wilayah, memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, serta pasar dan pusat ekonomi lainnya. Debgan adanya perbaikan jalan telah mendorong aktivitas ekonomi lokal, khususnya di sektor pertanian dan perdagangan. Petani mengakui bahwa akses jalan yang lebih baik memungkinkan mereka menjual hasil panen ke pasar dengan lebih cepat dan biaya transportasi yang lebih rendah.

Tabel 4.1 Data Infrastruktur Jalan 2019-2022

Jenis Jalan	Panjang Jalan Menurut Pmerintah (km)			
	2019	2020	2021	2022
Jalan Negara	81,90	81,90	81,90	81,90
Jalan Provinsi	261,10	261,10	261,10	261,10
Jalan Kabupaten	2.009,90	2.009,90	2.009,90	2.009,90
Jumlah	2.352,90	2.352,90	2.352,90	2.352,90

Sumber: Badan Pusat statistik (BPS)

Pada periode 2019 hingga 2022, pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan menunjukkan tingkat kestabilitas yang cukup baik. Hal ini didasarkan pada data yang

di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Way Kanan (2024), panjang jalan berdasarkan klasifikasi pemerintah tercatat tetap pada angka 2.352,90kilometer setiap tahunnya. Secara rinci, jalan negara memiliki panjang 81,90 kilometer, jalan provinsi 261,10 kilometer, dan jalan kabupaten mencakup 2.009,90 kilometer.

Ketiadaan perubahan signifikan dalam panjang jalan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah cenderung memprioritaskan aspek pemeliharaan infrastruktur yang telah ada ketimbang melakukan perluasan jaringan jalan. Stabilitas ini juga mencerminkan bahwa infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan sudah mencakup sebagian besar wilayah yang membutuhkan konektivitas, walaupun tantangan terkait kualitas jalan dan aksesibilitas ke daerah terpencil tetap perlu mendapatkan perhatian khusus.

Infrastruktur jalan berperan vital dalam memperkuat konektivitas antarwilayah, yang pada akhirnya mendukung berbagai aspek pembangunan manusia, seperti peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, dan kegiatan ekonomi. Jalan yang memadai memungkinkan masyarakat lebih mudah mengakses layanan dasar, memperlancar distribusi produk, serta meningkatkan mobilitas tenaga kerja. Hal ini secara tidak langsung mendukung pertumbuhan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Selain pembangunan fisik, peningkatan kualitas hidup masyarakat juga tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang mencakup dimensi pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Upaya peningkatan IPM di Kabupaten Way Kanan terlihat dari meningkatnya jumlah fasilitas pendidikan, seperti sekolah dasar dan menengah, serta akses terhadap layanan kesehatan dasar. Pemerintah daerah juga Melaksanakan berbagai program pemberdayaan masyarakat, seperti pelatihan keterampilan dan pemberian dukungan kepada UMKM, yang secara tidak langsung turut mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Tabel 4.2 Data Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Way Kanan

Tahun	Jumlah IPM
2020	69,33
2021	69,46
2022	69,92
2023	70,51
2024	71,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Selaras dengan stabilitas jaringan jalan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Way Kanan juga menunjukkan kecenderungan bertumbuh. Pada tahun 2020, IPM berada di angka 69,33 dan terus mengalami pertumbuhan bertahap menjadi 69,46 pada 2021, 69,92 pada 2022, 70,51 pada 2023, hingga mencapai 71,17 pada 2024. Pertumbuhan IPM ini menunjukkan adanya peningkatan pada dimensi kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat.

Peningkatan IPM ini menandakan adanya kemajuan dalam pembangunan manusia yang konsisten. Infrastruktur jalan yang terpelihara baik telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan aksesibilitas layanan pendidikan, fasilitas kesehatan, serta peluang ekonomi. Di samping itu, kelancaran mobilitas barang dan jasa turut mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa yang berimbas pada meningkatnya kesejahteraan penduduk.

Dalam konteks sosial, partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting. Warga setempat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam musyawarah pembangunan desa dan forum-forum perencanaan di tingkat kecamatan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif mulai diterapkan dalam proses pembangunan, yang menjadi elemen penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Literatur mendukung pentingnya sinergi antara pembangunan infrastruktur dan peningkatan IPM. Menurut Todaro dan Smith (2020), pembangunan ekonomi yang berkelanjutan hanya bisa dicapai apabila diperkuat oleh peningkatan mutu sumber daya manusia serta fasilitas yang menunjang kegiatan ekonomi. Hal ini relevan dengan kondisi di Way Kanan, di mana kombinasi antara pembangunan jalan dan peningkatan IPM memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

4.1 Analisis Infrastruktur Jalan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Way Kanan

Infrastruktur jalan merupakan salah satu komponen utama dalam menunjang perkembangan ekonomi di suatu wilayah. Di Kabupaten Way Kanan, pembangunan jalan menjadi prioritas pemerintah daerah dalam beberapa tahun terakhir, terutama pada akses antar kecamatan dan jalur distribusi hasil pertanian. Jalan-jalan utama yang sebelumnya mengalami kerusakan dan sulit diakses kini mulai mendapat perbaikan, sehingga memperlancar arus barang dan jasa.

Tabel 4.1.1 Data kondisi jalan Kabupaten Way Kanan 2021-2022

	Panjang Jalan Menurut Kondisi jalan (KM)	
Keterangan	2021	2022
Baik	282,41	303,24
Sedang	690,98	462,42
Rusak	815,64	223,15
Rusak Berat	220,86	1.021,08

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berlandasan pada data Badan Pusat Statistik (BPS), kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan menunjukkan dinamika yang signifikan dalam periode 2021 hingga 2022. Pada tahun 2021, panjang jalan dengan kondisi baik tercatat sebesar 282,41 km, sedangkan jalan dengan kondisi sedang, rusak, dan rusak berat masing-masing sepanjang 690,98 km, 815,64 km, dan 220,86 km. Pada tahun 2022, terjadi peningkatan panjang jalan dalam kondisi baik menjadi 303,24 km, namun terdapat lonjakan jalan dengan kondisi rusak berat menjadi 1.021,08 km.

Keadaan jalan yang memadai memiliki dampak signifikan terhadap kelancaran mobilitas orang dan barang, mempercepat distribusi hasil produksi, serta mengurangi biaya logistik. Sebaliknya, tingginya proporsi jalan rusak berat dapat menghambat aktivitas ekonomi dan memperlambat pertumbuhan wilayah. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan menjadi unsur krusial yang perlu dipertimbangkan dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan.

Kondisi tersebut dapat disimpulkan melalui adanya perbaikan jalan akan berdampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Dimana Sebelum jalan diperbaiki, biaya angkut hasil panen sangat tinggi karena adanya jalan yang rusak dan memakan waktu banyak. Setelah infrastruktur membaik, biaya angkut panen menjadi lebih rendah. Hal ini memungkinkan petani mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan mendorong mereka untuk meningkatkan produksi.

Salah satu contoh konkret adalah perbaikan jalan penghubung antara Kampung Suka Negeri dan Kecamatan Banjit yang sebelumnya memerlukan waktu lebih dari 2 jam perjalanan untuk mengangkut hasil tani. Setelah pembangunan jalan, waktu tempuh hanya memakan

waktu sekitar 45 menit. Hal ini tidak hanya mempercepat proses distribusi, tetapi juga meningkatkan kualitas hasil karena barang tidak rusak dalam perjalanan.

Selain itu, jalan yang lebih baik juga meningkatkan konektivitas antar wilayah dalam kabupaten. Warga kini lebih mudah mengakses pusat pelayanan publik, pasar tradisional, serta peluang kerja di wilayah lain. Peningkatan mobilitas ini tidak hanya menggerakkan sektor perdagangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor jasa seperti angkutan umum, warung makan, dan logistik. Fenomena ini menunjukkan efek pengganda (multiplier effect) dari pembangunan infrastruktur terhadap aktivitas ekonomi lokal.

Dalam konteks sosial, infrastruktur jalan juga berperan penting dalam membuka isolasi desa-desa terpencil. Kini, dengan akses jalan yang membaik maka dapat memepermudah warga setempat dalam melakuan aktivas baik kegiatan ekonomi, anak-anak yang dapat bersekolah lebih teratur, dan ibu hamil lebih mudah mencapai fasilitas kesehatan. Ini menunjukkan adanya hubungan tidak langsung antara pembangunan jalan dan peningkatan kualitas hidup yang menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi daerah.

Dalam kajian literatur, Todaro dan Smith (2020) menyebutkan bahwa infrastruktur fisik seperti jalan merupakan pendorong utama kegiatan ekonomi, karena mempercepat distribusi, memperluas pasar, dan meningkatkan efisiensi produksi. Hal ini juga didukung oleh Tarigan (2005), yang menekankan bahwa pembangunan transportasi membuka peluang aglomerasi ekonomi dan konektivitas antarwilayah, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan berperan besar dalam mempercepat sirkulasi ekonomi, membuka akses terhadap layanan dasar, dan menciptakan lapangan kerja baru. Perbaikan jalan yang berkelanjutan, disertai dengan partisipasi aktif masyarakat dan dukungan kebijakan pemerintah daerah, akan menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang inklusif dan berkeadilan.

4.2 Analisis Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Way Kanan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator gabungan yang digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (pengetahuan), serta ekonomi (standar hidup layak). Di

Kabupaten Way Kanan, upaya peningkatan IPM menjadi prioritas pembangunan, mengingat perannya yang diyakini berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 4.2.1 Data Indeks Pembangunan Manusia 2020-2024

Tahun	Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Pengeluaran Per Kapita	IPM
2020	73,63	12,36	7,70	9,102	69,33
2021	73,73	12,37	7,71	9,173	69,46
2022	73,93	12,42	7,72	9,450	69,92
2023	74,11	12,43	7,74	9,887	70,51
2024	74,31	12,44	7,75	10,439	71,17

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Way Kanan memperlihatkan kecenderungan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Nilai IPM tercatat sebesar 69,33 pada tahun 2020 dan meningkat secara bertahap hingga mencapai 71,17 pada tahun 2024. Peningkatan IPM ini didukung oleh berbagai indikator, seperti umur harapan hidup yang naik dari 73,63 tahun pada 2020 menjadi 74,31 tahun pada 2024, serta angka harapan lama sekolah turut mengalami kenaikan, dari 12,36 tahun menjadi 12,44 tahun dalam periode yang sama. Selain itu, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran per kapita menunjukkan pertumbuhan positif.

Peningkatan IPM mencerminkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang berimplikasi langsung terhadap produktivitas ekonomi. Kualitas pendidikan yang lebih baik, tingkat kesehatan yang lebih tinggi, serta daya beli masyarakat yang meningkat, semuanya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan demikian, peningkatan IPM di Kabupaten Way Kanan merupakan salah satu elemen kunci yang berkontribusi terhadap berkelanjutan pertumbuhan ekonomi.

Dari dimensi pendidikan, data dari Dinas Pendidikan menunjukkan bahwa angka partisipasi sekolah di tingkat dasar hingga menengah mengalami peningkatan antara tahun 2020–2024. Pembangunan infrastruktur pendidikan, seperti rehabilitasi ruang kelas

dan penambahan sarana belajar, menjadi faktor pendukung. Sehingga kemampuan literasi dan numerasi siswa pun membaik, yang dalam jangka panjang akan menciptakan sumber daya manusia yang produktif dan adaptif terhadap perubahan ekonomi.

Pada dimensi kesehatan, pembangunan puskesmas pembantu dan peningkatan layanan posyandu di daerah terpencil memberikan dampak positif terhadap status kesehatan masyarakat. Tenaga medis yang sebelumnya kesulitan menjangkau desa-desa terpencil kini dapat melayani secara lebih rutin karena akses jalan yang membaik. Sehingga dapat meningkatkan pelayanan public bagi Masyarakat desa terpencil, serta meningkatnya layanan kesehatan di puskesmas di daerah terpencil. Dengan peningkatan status kesehatan, produktivitas masyarakat juga turut meningkat, karena masyarakat menjadi lebih sehat, aktif, dan mampu bekerja secara optimal.

Untuk dimensi standar hidup layak, peningkatan IPM juga didorong oleh berbagai program pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti pelatihan wirausaha, bantuan modal UMKM, dan pelatihan digital marketing. Beberapa pelaku usaha kecil di Kecamatan Kasui menyampaikan bahwa program pelatihan kewirausahaan digital telah membantu mereka memasarkan produk kerajinan ke luar daerah. Transformasi digital ini membuka peluang ekonomi baru, khususnya bagi generasi muda, sehingga turut mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis masyarakat.

Secara keseluruhan, peningkatan IPM tidak hanya memperbaiki kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperluas kapasitas mereka untuk berkontribusi dalam aktivitas ekonomi. Seperti disampaikan oleh Sen (1999), pembangunan manusia merupakan fondasi dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ketika masyarakat sehat, terdidik, dan memiliki pendapatan yang layak, maka daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat dan merata.

4.3 Peran Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan IPM

Pemerintah Kabupaten Way Kanan memiliki peran sentral dalam menyusun kebijakan, mengoordinasikan program pembangunan, dan memastikan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pelaksanaan. Peran ini tercermin dalam perencanaan, implementasi, serta pengawasan pembangunan yang mencakup prasarana serta peningkatan mutu sumber daya manusia.

Pada bidang infrastruktur jalan, otoritas daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) menetapkan sejumlah jalur strategis yang menjadi prioritas pembangunan, terutama jalan penghubung antar kecamatan dan akses menuju sentra produksi pertanian. Berdasarkan dokumen RKPD tahun 2023, alokasi anggaran infrastruktur mencapai hampir 40% dari total belanja daerah. Ini menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan konektivitas wilayah. Tak hanya itu, melalui program padat karya, pembangunan jalan juga melibatkan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja, yang memberikan efek ganda terhadap ekonomi lokal.

Untuk mendukung peningkatan IPM, pemerintah daerah menjalankan program Way Kanan Cerdas dan Way Kanan Sehat yang mencakup peningkatan mutu pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan primer, dan pemberdayaan ekonomi keluarga. Di sektor pendidikan, selain membangun fasilitas fisik, pemerintah juga fokus pada pelatihan guru dan penguatan kurikulum berbasis potensi lokal. Sementara di sektor kesehatan, pengadaan ambulans desa, revitalisasi puskesmas, dan program gizi balita menjadi langkah nyata.

Kebijakan pembangunan juga melibatkan masyarakat melalui forum-forum partisipatif seperti Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat kampung, kecamatan, dan kabupaten. Proses ini memungkinkan masyarakat untuk mengusulkan prioritas pembangunan secara langsung, termasuk kebutuhan infrastruktur dan sosial ekonomi. Pendekatan partisipatif ini sejalan dengan prinsip good governance dan memperkuat legitimasi program pemerintah.

Namun demikian, tantangan masih ada, seperti keterbatasan SDM teknis, ketimpangan pembangunan antarwilayah, serta ketergantungan pada dana transfer pusat. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kolaboratif yang melibatkan sektor swasta, BUMDes, dan lembaga masyarakat sipil. Pemerintah juga perlu terus mendorong digitalisasi layanan publik dan peningkatan kapasitas aparatur desa agar pembangunan bisa lebih responsif dan inovatif.

Dengan peran aktif pemerintah daerah yang disertai komitmen anggaran, pendekatan berbasis data, dan partisipasi warga, maka pembangunan infrastruktur dan peningkatan IPM akan menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Way Kanan secara berkelanjutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Way Kanan berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Perbaikan dan peningkatan kualitas jalan telah berhasil memperlancar arus distribusi barang dan jasa, mengurangi waktu serta biaya transportasi bagi petani dan pelaku usaha lokal. Seiring dengan itu, aksesibilitas yang lebih baik memberikan peluang bagi petani untuk meningkatkan produksi dan menjangkau pasar dengan lebih efisien, sehingga meningkatkan pendapatan mereka.

Selain itu, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Way Kanan menunjukkan dampak positif sehingga signifikan terhadap kualitas hidup masyarakat. Peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang tercapai melalui program-program pemerintah dan pembangunan fisik, turut berkontribusi terhadap daya beli masyarakat serta partisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi.

Kedua aspek yaitu pembangunan infrastruktur dan peningkatan IPM saling bersinergi untuk menciptakan lingkungan dalam keadaan yang baik bagi pertumbuhan ekonomi yang terbuka dan bekesinambungan. Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk terus melanjutkan investasi dalam infrastruktur serta program pemberdayaan masyarakat, sehingga dapat memaksimalkan dampak memberikan dampak baik bagi ekonomi dan tingkat kesejahteraan di Kabupaten Way Kanan di masa mendatang.

B. Saran

1. Peningkatan Infrastruktur Jalan

Pemerintah daerah diharapkan untuk terus meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur jalan, terutama di daerah terpencil dan pedesaan. Penugasan dana yang cukup untuk perawatan dan pemeliharaan jalan juga sangat penting untuk memastikan akses yang berkelanjutan dan memadai.

2. Program Pemberdayaan Masyarakat

Diperlukan program-program pemberdayaan masyarakat yang lebih luas, termasuk pelatihan keterampilan bagi petani dan pelaku usaha lokal. Hal ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta memperkuat kemampuan mereka dalam bersaing di pasar.

3. Pengembangan Sektor Pendidikan dan Kesehatan

Pemerintah harus fokus pada peningkatan kualitas fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan. Pembangunan sekolah dan pusat kesehatan yang lebih baik, serta penyediaan akses yang memadai ke layanan tersebut, sangat penting untuk meningkatkan IPM di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Basri, F. (2009). Ekonomi Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Lulus Rr. Prapti NSS, Edy Suryawardana dan Dian Triyani, 2015, Analisis

Dampak Pembangunan Infrastruktur JalanTerhadap Pertumbuhan Usaha Ekonomi Rakyat di Kota Semarang, jurnal dinamika sosbut, Vol.17 No.2

Meidiana, N. P. C. A. T. & Marhaeni, A. A. I. N. 2019, Pengaruh Kepemilikan Aset, Ketersediaan Infrastruktur, Dan Pendidikan

Terhadap Pendapatan Dan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin. Bul. Stud. Ekon. 24, 54

Moeloeng, Lexy. 2007. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya

Patresia Stella I. Dumatubun, Melsi Simon Rerung, dan Yahya Nusa, 2024, Analisis dampak peningkatan infrastruktur jalan Hasannudin-

Petrosea terhadap aktivitas ekonomi masyarakat sekitar di kota timika, jurnal kritis, Vol.7 No.2

Purnamawati Ayuu Gusti dan Yuniarta Adu Gede, Ekonomi Makro teori dan kebijakan, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2021) cetakan 1

Putri Aren Sinta dan Situmorang Lisbet, 2022, infrastrktur Jalan Sebagai Kelangsungan Kehidupan Sosial Eonomi Masyarakat, Jurnal Pembangunan Sosial, Vol.1 No.1

Putu Ni Eka Sari dan I Gde Kajeng Baskara, 2018, Nilai Tukar, Nilai Ekspor, dan pertumbuhan ekonomi terhadap profitabilitas eksportir food and beverage di BEI, jurnal manajemen unud, vol.7 no.8

Rayana Dwi Siregar dan Ahmad Albar Tanjung, 2020, Pengaruh Infrastruktur dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Langkat 2010-2019, Jurnal Ekonomi Bisnis, Vol.19 No.2

Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alphabet.

Sumarsono, S. (2001). Teori dan Kebijakan Publik. Yogyakarta: Liberty.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga (Edisi kedelapan, Jilid 1, diterjemahkan oleh Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.

Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2006). Pembangunan Ekonomi (Edisi kesembilan, Jilid 1). Jakarta: Erlangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022

UNDP. (2022). Human Development Report 2022. New York: United Nations Development Programme.